

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Era otonomi daerah yang mensaratkan pemekaran dan pembentukkan daerah untuk mengurus daerahnya terus menjadi agenda kontemporer. Semangat tersebut akan menjadi ajang bagi pemerintah daerah untuk menata dan memberikan warna tersendiri dalam perjalanan kemajemukan bangsa ini.

Pada masyarakat yang majemuk seperti ini, berbagai macam terminologi yang akan menjadi pendorong untuk menumbuhkan identitas kedaerahan sangat dimungkinkan. Identitas pun dibentuk berdasar pada konteks kedaerahan, seperti agama, adat atau pun etnis hingga ke level kemajuan ekonomi dan teknologi. Konstruksi identitas yang menjadi kekhasan bagi daerah tersebut untuk kemudian menjadi berbeda dengan daerah yang lain. Alberto Melucci telah mengingatkan *“in contemporary societis, a specific sector or subsystem for collective action is becoming a differentiated and stable component in the working of the system.”*¹.

Pemekaran daerah di samping didorong oleh semangat percepatan pembangunan, juga diiringi oleh keinginan untuk memperoleh label tersendiri bagi daerah yang dimekarkan. Adanya pemberian label identitas tertentu di setiap daerah seringkali tidak diikuti oleh alasan yang jelas argumentasinya. Identitas tersebut seringkali menjadi penanda setiap zaman dari sebuah era pemerintahan tertentu. Oleh karena identitas dikonstruksi dari ciri khas yang paling nampak dari sebuah daerah maka ini berdampak pada memori kolektif antara identitas dan era kepemimpinan tertentu sebagai pencetus identitas yang dimaksud akan selalu dikenang.

¹ Alberto Melucci *A Strange Kind of Newness: what's "new" in new social movements? Dalam Larana, Eric (ed) (Philadelphia: Temple University Press, 1994) hlm.116*

Pada era tertentu dan terdahulu juga telah memulai proyek politik identitasnya di Kota Gorontalo. Kota Hijau misalnya, pernah menjadi identitas untuk Kota Gorontalo pada rezim tertentu dan kemudian dari sinilah penghargaan Adipura itu diraih Kota Gorontalo. Adapun tujuan dari program dan pelabelan Kota Hijau adalah untuk menertibkan Lingkungan Kota Gorontalo yang hijau dan menarik pemandangannya.² Bisa dilihat penghargaan Adipura diabadikan dalam bentuk tugu di seputaran perlimaan Kota Gorontalo.

Selain proyek Kota Hijau, Kota Gorontalo juga telah memiliki beberapa identitas seperti Serambi Madinah, Kota Bentor dan juga yang terakhir adalah label Kota Madrasah.³ Serambi Madinah dan Kota Madrasah memiliki kesan yang lebih religius.

Di beberapa daerah di Provinsi Gorontalo juga mengalami hal yang serupa. Identitas di beberapa wilayah di Kabupaten Gorontalo juga ‘dikelola’ oleh kepemimpinan yang berkuasa di daerah itu dengan merepresentasikan ciri khas daerah yang bersangkutan. Akan tetapi alasan efektivitas maka fokus permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini berada di Kota Gorontalo.

Kota Gorontalo menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Termasuk bagaimana identitas keagamaan difungsikan sebagai modal politik di Kota Gorontalo. Ini mengingat penduduk Kota Gorontalo berjumlah berjumlah 184.185 di mana Islam merupakan agama mayoritas dengan jumlah 178.274.⁴ maka jumlah penduduk itulah yang menjadikan kesan religius sangat diutamakan. Ini mengingat pendapat Daldjoeni yang mengatakan bahwa suatu kota bisa diklasifikasikan berdasarkan jumlah penghuni.⁵

² Funco Tanipu *Raut Muka Gorontalo Kita* (Yogyakarta; HPMIG Press, 2008) hlm 93.

³ Funco Tanipu *Politik Poskolonial dan Postur Modernitas Kota Gorontalo*, dalam *energi peradaban*, Syamsu Q. Badu ed) (UNG Press, 2010) halm. 33.

⁴ Sumber; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo (per April 2010)

⁵ Daldjoeni, *Seluk Beluk Masyarakat Kota*, (Bandung; Alumni, 1992) hlm. 69

Dari total jumlah penduduk Kota Gorontalo tersebut tersebut sejumlah 137.789 merupakan daftar pemilih tetap pada pemilihan walikota tahun 2013.⁶ Dari sini tentu agama merupakan aspek yang paling menonjol untuk dijadikan identitas dibanding yang lainnya. Dan juga bisa menjadi instrumen atau isu penting dalam setiap perhelatan politik.

Dalam konteks kedaerahan sebagaimana telah terpaparkan di atas, identitas lazim digunakan untuk menunjukkan identitas daerah (yang seringkali bermakna positif dan unggul) bagi daerah lain. Identitas sendiri memang ditujukan untuk menjadi pembeda antara diri (*the self*) dan diri yang lain (*the others*) yang kemudian bisa menjadi acuan bagi berbagai macam aspek seperti: sosial, politik, budaya, dan sebagainya.⁷ Identitas tersebut akan digunakan sebagai penanda bagi yang lain. Olehnya identitas bisa dikonstruksi dan diciptakan.

Dalam konteks kota Madrasah, ide ini digagas sejak tahun 2007 oleh Ketua DPRD Kota Gorontalo saat itu. Hal ini bukan berarti Kota Gorontalo semata-mata menjadikan pendidikannya berbasis madrasah. Namun kandungan dan makna madrasah itu sendiri yang akan menjadi aktualisasi nilai dan kehidupan di Gorontalo.⁸ Setahun kemudian (tahun 2008) Ketua DPRD Kota Gorontalo Mengaktualisasikan gagasan tersebut tatkala dipercayakan menjadi Walikota Gorontalo.

Ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita lihat, yaitu ternyata identitas bukan semata-mata membedakan antara diri (*the self*) dan diri yang lain (*the others*) tapi juga kini identitas bisa menjadi pembeda antara masa yang lalu (*Past*) dan masa kini (*Present*). Kota Gorontalo yang dahulunya adalah Kota Hijau identitasnya, berganti rezim telah menjadikan identitas agama kini sering digunakan sebagaimana Kota Madrasah dan Serambi Madinah. Yang

⁶ Sumber; KPU Kota Gorontalo (diumumkan pada 15 Februari 2013)

⁷ Idris Rahim *disertasi Identitas Etno-Religius dalam Pembentukan Propinsi Gorontalo*, (Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga, 2010) hlm. 19

⁸ Masjrul Janto Usman dalam Tsanawiyahkota.blogspot.com diakses 25 februari 2013. di dalam tulisan blog ini ditulis bagaimana cita-cita pembentukan Kota Gorontalo sebagai Kota Madrasah tersebut berawal.

berikut ada penggunaan modal simbolik dalam penentuan identitas. Bourdieu menyatakan bahwa dalam masyarakat selalu ada yang dikuasai dan menguasai dan salah satu modal menguasai yaitu modal simbolik.⁹ Meski kadang di balik makna simbol tersebut terjadi proses dominasi. Identitas dikonstruksi untuk kemudian juga mengekalkan penguasa di benak masyarakat berdampingan dengan identitas daerah yang pernah digagas oleh penguasa.

Agama kemudian menjadi inspirasi dalam perpolitikan lokal dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dimana untuk menguatkan basis keagamaan Pemerintah Kota Gorontalo telah menuangkannya dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Gorontalo Periode 2008-2013 yang misinya adalah; mewujudkan masyarakat Kota Gorontalo yang mandiri dan religius.¹⁰

Di samping itu, atribut dan pernak-pernik kampanye misalnya, di Kota Gorontalo banyak para caleg yang lewat media kampanyenya berusaha menampilkan atribut religius seperti penggunaan peci dan jilbab. Juga, partai muslim yang menggunakan slogan yang sifatnya islami.

2. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada kondisi di atas maka pengajuan penelitian ini akan menggambarkan bagaimana dinamika keagamaan di Kota Gorontalo menjadi sebuah modal yang menjadi instrumen dalam politik kita. Penelitian ini akan melihat bagaimana sebaran kebijakan dan regulasi pemerintah untuk menguatkan identitas kota madrasah tersebut. Sehingga fokus dan rumusan masalah dipersempit menjadi:

1. Apa sebab agama menjadi modal sosial dan politik di Kota Gorontalo?
2. Apa persepsi Masyarakat terhadap penggunaan agama dalam kehidupan sosial dan politik lokal di Kota Gorontalo?

⁹ Lihat Haryatmoko *Dominasi Penuh Muslihat* (Jakarta; Gramedia Pustaka, 2010) hlm. 17

¹⁰ www.gorontalokota.go.id

1.3 Tujuan Penelitian

Memperhatikan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini diarahkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa sebab agama menjadi modal sosial dan politik di Kota Gorontalo.
2. Untuk melihat apa persepsi masyarakat terhadap adanya penggunaan identitas agama sebagai modal dalam berpolitik di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pengembangan ilmu sosial utamanya studi tentang identitas yang berkaitan dengan kehidupan sosial itu sendiri.
2. Sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi dunia akademik untuk kemudian menjadi bahan perbandingan, seminar, diskusi, dan penelitian lanjutan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Secara spesifik penelitian mengenai Politik Identitas Kota Madrasah di Kota Gorontalo belum pernah dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan bisa dijadikan sebagai acuan adalah penelitian disertasi yang dilakukan oleh Idris Rahim yang berjudul Identitas Etno Religius dalam pembentukan Provinsi Gorontalo. Di mana disertasi tersebut berangkat dari persoalan pemekaran daerah dan Gorontalo menjadi salah satunya dengan menjadikan identitas seperti etnis dan religius sebagai instrumen gerakan. Dengan identitas tersebut maka gerakan-gerakan perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo dilakukan.